

Inovasi dalam Evaluasi Kebijakan Publik

Innovation in Public Policy Evaluation

Muhammad Adib Farhan¹, Dimas Febrianto², Eka Widiarti³

^{1,2,3} Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 05, 2025

Revised 10 November 2025

Accepted 25 November 2025

Available online 16 December 2025

Keywords

Inovasi ; Kebijakan Publik ; Pemerintah

Keywords

Innovation; Public Policy; Government



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Innovation in public policy evaluation has become an important issue in improving policy effectiveness and efficiency. This study aims to analyze the role of innovation in public policy evaluation, identify effective innovative approaches, and explore the challenges and opportunities of their implementation in Indonesia. The method used is a literature review, which includes a critical analysis of various previous studies. The results show that innovations, such as the use of digital technology and participatory evaluation models, can improve the quality of policy evaluation. Technology enables faster and more accurate data collection, while public participation provides richer perspectives. However, challenges such as limited data availability, low transparency, and minimal public participation remain major obstacles. This study also reviews best practices from other countries as references for the local context. These findings provide recommendations for policymakers to adopt more modern and inclusive approaches to policy evaluation, in line with the principles of good governance. Thus, public policy evaluation is expected to become a more adaptive and relevant instrument in supporting evidence-based decision-making.

ABSTRAK

Inovasi dalam evaluasi kebijakan publik menjadi isu penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran inovasi dalam evaluasi kebijakan publik, mengidentifikasi pendekatan-pendekatan inovatif yang efektif, serta mengeksplorasi tantangan dan peluang implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur, yang mencakup analisis kritis terhadap berbagai penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi, seperti penggunaan teknologi digital dan model evaluasi partisipatif, mampu meningkatkan kualitas evaluasi kebijakan. Teknologi memungkinkan pengumpulan data lebih cepat dan akurat, sementara partisipasi masyarakat memberikan perspektif lebih kaya. Namun, tantangan seperti keterbatasan data, rendahnya transparansi, dan minimnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini juga mengulas praktik terbaik dari negara lain sebagai referensi untuk konteks lokal. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan inklusif dalam evaluasi kebijakan, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, diharapkan evaluasi kebijakan publik dapat menjadi instrumen yang lebih adaptif dan relevan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti..

PENDAHULUAN

Inovasi dalam evaluasi kebijakan publik menjadi isu yang semakin penting di tengah kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh masyarakat modern (Nur et al., 2024). Kebijakan publik dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut melalui pendekatan strategis yang melibatkan berbagai pihak. Namun, efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh formulasi yang tepat, tetapi juga oleh keberhasilan implementasi dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis. Evaluasi kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk menilai apakah suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, serta mengidentifikasi hambatan atau kelemahan yang perlu diperbaiki (Rantung, 2024). Dalam konteks ini, inovasi memainkan peran

*Corresponding Author

Email: adibfarhaan07@gmail.com, dimas20191@gmail.com, ekawidiarti302@gmail.com

penting untuk meningkatkan kualitas evaluasi, khususnya dalam menghadapi tuntutan era digital dan revolusi industri 4.0.

Penelitian tentang evaluasi kebijakan publik telah dilakukan oleh berbagai akademisi dan praktisi, menunjukkan bahwa pendekatan tradisional seringkali memiliki keterbatasan dalam memberikan hasil yang komprehensif. Penelitian oleh Herlina et al (2023) menyoroti pentingnya analisis kebijakan yang berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Namun, pendekatan yang konvensional cenderung lamban dalam merespons perubahan lingkungan dan seringkali kurang melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi. Hal ini diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Sururi (2017), yang menunjukkan bahwa inovasi dalam evaluasi kebijakan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, terutama melalui penerapan teknologi seperti big data dan analitik prediktif. Studi ini juga menemukan bahwa evaluasi yang inovatif dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan aplikatif, sehingga mendukung keberlanjutan kebijakan.

Di Indonesia, tantangan dalam evaluasi kebijakan publik masih berkisar pada kurangnya transparansi, keterbatasan data, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Permasalahan ini menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam evaluasi program bantuan sosial, seringkali ditemukan ketidaktepatan sasaran akibat kurangnya validitas data yang digunakan. Selain itu, evaluasi sering kali dilakukan sebagai formalitas belaka tanpa memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kebijakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa diperlukan perubahan paradigma dalam evaluasi kebijakan publik, dari yang bersifat reaktif menjadi lebih proaktif, serta dari yang berfokus pada hasil akhir menjadi lebih menekankan pada proses dan dampak jangka panjang.

Inovasi dalam evaluasi kebijakan publik mencakup berbagai pendekatan, mulai dari penggunaan teknologi digital hingga pengembangan model evaluasi partisipatif. Teknologi digital, seperti aplikasi berbasis web, platform survei online, dan alat analitik data, memungkinkan pengumpulan data secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi memberikan perspektif yang lebih kaya dan mendalam, karena melibatkan yang langsung merasakan dampak kebijakan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas (Pomeo & Winarti, 2024).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya inovasi dalam evaluasi kebijakan publik sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan-pendekatan inovatif yang telah terbukti efektif, serta mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam implementasinya di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk mengembangkan sistem evaluasi yang lebih adaptif dan relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini juga akan mengeksplorasi contoh-contoh penerapan inovasi evaluasi kebijakan di negara-negara lain yang telah berhasil meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui pendekatan yang lebih modern dan inklusif. Kajian terhadap praktik-praktik terbaik (*best practices*) ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk mengadopsi dan menyesuaikan inovasi serupa sesuai dengan konteks lokal. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka kerja evaluasi kebijakan publik yang lebih baik, serta memperkuat peran evaluasi sebagai instrumen penting dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang berbasis bukti.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan ialah *literature review*. Metode penelitian *literature review* merupakan pendekatan yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi literatur atau penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tertentu (Agus et al., 2023). Metode ini digunakan untuk memahami perkembangan kajian dalam suatu bidang, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memberikan landasan teoretis dan empiris bagi penelitian lebih lanjut. *Literature review* tidak hanya mencakup ringkasan dari penelitian terdahulu, tetapi juga analisis kritis terhadap isi, metodologi, dan temuan dari studi-studi tersebut. Menurut Sahir (2022) adapun tahapan penelitian meliputi :

1. Penelitian ini diawali dengan identifikasi topik atau pertanyaan penelitian yang jelas. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kajian literatur yang dilakukan terfokus dan relevan. Setelah topik ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih sumber literatur. Kriteria ini dapat mencakup tahun publikasi, relevansi dengan topik, kualitas penelitian, dan jenis studi yang digunakan. Dengan demikian, hanya literatur yang memenuhi kriteria yang akan dianalisis lebih lanjut.
2. Setelah menetapkan kriteria, peneliti mulai mengumpulkan sumber literatur. Proses pengumpulan ini biasanya melibatkan pencarian di basis data akademik seperti *Google Scholar*, *PubMed*, *Scopus*, atau *ProQuest*. Selain itu, buku, laporan penelitian, artikel jurnal, dan dokumen resmi juga sering menjadi sumber data utama dalam *literature review*. Untuk memastikan cakupan yang komprehensif, pencarian literatur sering kali dilakukan menggunakan kata kunci tertentu yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian.
3. Tahap berikutnya adalah analisis dan sintesis literatur yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan membaca dan memahami isi literatur secara mendalam, mencatat informasi-informasi kunci, dan mengevaluasi metodologi serta kualitas penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memahami kontribusi setiap studi terhadap topik yang diteliti. Sintesis literatur dilakukan dengan mengelompokkan temuan dari berbagai sumber berdasarkan tema, teori, atau pendekatan yang digunakan. Dalam proses ini, peneliti juga mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam literatur. Metode *literature review* tidak hanya membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang topik yang diteliti, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk memberikan kontribusi dalam bentuk kritik atau saran bagi penelitian di masa depan. Dengan demikian, *literature review* menjadi elemen penting dalam pengembangan pengetahuan ilmiah, baik dalam konteks akademik maupun praktis.
4. Selanjutnya, hasil kajian literatur dirangkum dan disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis. Penulisan laporan kajian literatur mencakup pendahuluan, tinjauan teoritis, analisis temuan, serta kesimpulan. Pendahuluan biasanya berisi latar belakang masalah dan tujuan dari kajian literatur. Bagian tinjauan teoritis memaparkan konsep-konsep utama yang menjadi dasar penelitian. Analisis temuan mencakup pembahasan temuan utama dari literatur yang dikaji, sedangkan kesimpulan berisi ringkasan hasil kajian dan rekomendasi untuk penelitian mendatang.

Secara keseluruhan, metode *literature review* merupakan pendekatan yang sangat bermanfaat untuk mengeksplorasi dan memahami topik tertentu secara mendalam. Dengan melakukan analisis kritis terhadap literatur yang ada, peneliti tidak hanya mendapatkan wawasan baru tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

HASIL

Teori Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu elemen penting dalam siklus kebijakan publik. Menurut (Abdoellah & Rusfiana, 2016) evaluasi kebijakan adalah proses analitis yang bertujuan untuk menentukan sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi mencakup analisis efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan kebijakan.

Menurut Rantung (2024) dalam literatur, terdapat beberapa teori evaluasi kebijakan yang sering digunakan, di antaranya:

1. Teori utilitarian

Menitikberatkan pada hasil atau dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori ini mengukur keberhasilan kebijakan berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas.

2. Teori Rasionalitas Terbatas

Teori ini menjelaskan bahwa pembuat kebijakan sering kali tidak memiliki informasi lengkap dan sempurna, sehingga evaluasi kebijakan menjadi sarana untuk mengevaluasi pilihan rasional yang diambil dalam kondisi keterbatasan.

3. Teori Partisipatif

Teori ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi berbagai pihak yang terdampak.

4. Teori Sistem

Kebijakan dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis interaksi kebijakan dengan elemen-elemen sistem lain, seperti ekonomi, sosial, dan politik.

Proses Kebijakan

Proses kebijakan melibatkan beberapa tahapan utama yang saling terkait. Tahapan ini menggambarkan perjalanan kebijakan mulai dari perumusan hingga implementasi dan evaluasi. Berdasarkan model yang dikembangkan oleh (Rantung, 2024) proses kebijakan terdiri dari:

1. Identifikasi Masalah: Tahap ini melibatkan pengumpulan data dan analisis untuk mengidentifikasi isu atau masalah yang memerlukan intervensi kebijakan.
2. Perumusan Kebijakan: Pada tahap ini, alternatif solusi dikembangkan dan dianalisis untuk menentukan kebijakan yang paling sesuai.
3. Pengambilan Keputusan: Pemerintah atau otoritas terkait memilih salah satu alternatif kebijakan yang dianggap terbaik.
4. Implementasi Kebijakan: Kebijakan yang telah dipilih diterapkan melalui program atau tindakan tertentu.
5. Evaluasi Kebijakan: Tahap akhir dari proses kebijakan adalah mengevaluasi apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Literatur menunjukkan bahwa proses kebijakan sering kali tidak linier. Kebijakan dapat mengalami revisi atau modifikasi di tengah proses, terutama jika ditemukan kendala atau perubahan kondisi eksternal.

PEMBAHASAN

Berdasarkan literatur yang dikaji, evaluasi kebijakan merupakan instrumen kunci dalam memastikan keberlanjutan dan relevansi kebijakan publik. Proses evaluasi yang komprehensif

tidak hanya membantu memahami dampak kebijakan, tetapi juga menjadi dasar untuk inovasi. Inovasi dalam evaluasi kebijakan, seperti penggunaan teknologi modern dan pendekatan partisipatif, memberikan peluang baru untuk meningkatkan efektivitas evaluasi.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi dari pemangku kepentingan, dan kompleksitas data yang harus dikelola. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam mengembangkan metode evaluasi yang lebih adaptif dan inovatif. Dengan demikian, masa depan evaluasi kebijakan akan semakin bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi, keterlibatan masyarakat, dan pendekatan interdisipliner.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, evaluasi kebijakan merupakan bagian integral dari siklus kebijakan publik yang berperan penting dalam memastikan pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Teori evaluasi kebijakan, seperti utilitarian, rasionalitas terbatas, partisipatif, dan sistem, memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan kebijakan. Setiap teori tersebut menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami keberhasilan suatu kebijakan, baik dari sudut pandang manfaat bagi masyarakat, keterbatasan informasi pembuat kebijakan, partisipasi pemangku kepentingan, maupun interaksi kebijakan dengan elemen sistem yang lebih besar.

Proses kebijakan, yang terdiri dari tahapan identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi, menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak selalu berjalan secara linier. Revisi atau modifikasi kebijakan sering kali menjadi keniscayaan ketika kebijakan menghadapi kendala atau perubahan dalam situasi eksternal. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan bersifat adaptif dan membutuhkan evaluasi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi kelemahan serta mengusulkan perbaikan.

Pembahasan literatur juga menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan, tetapi juga sebagai sarana inovasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Penggunaan teknologi modern, seperti big data dan analisis berbasis AI, dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan proses evaluasi. Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya memastikan bahwa hasil evaluasi mencerminkan kebutuhan riil dan aspirasi mereka yang terdampak oleh kebijakan. Meski demikian, berbagai tantangan masih perlu diatasi, termasuk keterbatasan sumber daya, resistensi dari pihak-pihak tertentu, serta kompleksitas dalam pengelolaan data yang beragam dan sering kali tidak lengkap.

Oleh karena itu, masa depan evaluasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan pendekatan teknologi, partisipasi aktif masyarakat, dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Pendekatan interdisipliner juga menjadi kunci dalam menangani tantangan yang kompleks sekaligus menciptakan peluang baru untuk inovasi. Dengan demikian, evaluasi kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif diharapkan dapat mendukung terciptanya kebijakan publik yang lebih efektif, efisien, relevan, dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat luas.

REFERENSI

- Abdoellah, A., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agus, A. I., Nurlim, R., Asnaniar, W. O. S., Alam, R. I., Padhila, N. I., Ernasari, E., & Ramli, R. (2023). *Studi Literatur (Systematic, Narrative, Scoping, Argumentative, Theoretical)*. Purbalingga :

Cv.Eureka Media Aksara.

- Herlina, A., Hamka, & Katuuk, H. (2023). Pentingnya Inovasi Dalam Pelayanan Administrasi Publik Di Tengah Era Disrupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 4791–4800. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6890>
- Nur, M., Fitriani, A., Usulu, M. E., & Mahardhani, J. A. (2024). *Buku Referensi Inovasi Dalam Administrasi Publik*. Medan : PT Media Penerbit Indonesia.
- Pomeo, R. R. W., & Winarti, E. (2024). Dinamika Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kesehatan Di Daerah Terpencil : Tantangan Dan Realitas Lapangan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 2309–2329.
- Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model)*. Tandano : CV. Tahta Media Group. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733>
- Sahir, H. S. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : KBM Indonesia.
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 4(3), 1–14. <https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241>